



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

SKRIPSI



**RIA AMANDA YUSRA
0910112155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**



No. Alumni Universitas:	RIA AMANDA YUSRA	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi / 03 Agustus 1991	(f) Tanggal Lulus : 16 Januari 2013	
(b) Nama Orang Tua : Rasyidin Citra & Yusna Saruji	(g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
(c) Fakultas : Hukum	(h) IPK : 3.60	
(d) PK : Hukum Perdata Adat Islam	(i) Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan	
(e) No BP : 0910112155	(j) Alamat : Jl.Cupak Tengah No.54 A Pasar Baru Padang	

DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG


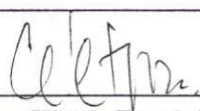
(Ria Amanda Yusra, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 0910112155, 56 Hlm, 2013)

ABSTRAK

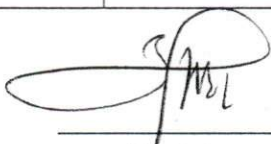
Dewasa ini fenomena kawin di bawah umur marak terjadi di masyarakat. Salah satunya praktek kawin di bawah umur yang penulis temui di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", selanjutnya dalam ayat (2) diatur terhadap pengecualian Pasal 7 tersebut dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Usia remaja merupakan usia di mana kematangan psikologis belum bisa di bilang matang, sehingga beresiko terhadap keutuhan rumah tangga nantinya yakni perceraian. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain: a) apa saja alasan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin, b) bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, c) apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama. Adapun metode pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin karena hubungan yang sudah terlanjur dekat antara keduanya dan ditambah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama saat pasangan ingin melaksanakan perkawinan dengan usia mereka yang belum mencukupi batas minimum usia perkawinan. Pelaksanaan dispenasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang diajukan melalui permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdictio voluntaria* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan. Sementara itu, yang menjadi faktor pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin adalah mengutamakan prinsip menolak mudharat dari pada mengambil kemashlahatan bagi permohonan yang dikabulkan dan terhadap permohonan yang ditolak didasarkan atas pertimbangan bahwa pemohon tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalilnya dalam persidangan di pengadilan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Januari 2013

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Damas Reny Priharty, SH. MH	Wetria Fauzi, SH. MH

Penguji,
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: Syahrial Razak, SH. MH


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:

DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

(Ria Amanda Yusra, 0910112155, Fak.Hukum Unand, Jumlah Halaman 56, 2013)

ABSTRAK

Dewasa ini fenomena kawin di bawah umur marak terjadi di masyarakat. Salah satunya praktek kawin di bawah umur yang penulis temui di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, selanjutnya dalam ayat (2) diatur terhadap pengecualian Pasal 7 tersebut dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Usia remaja merupakan usia di mana kematangan psikologis belum bisa di bilang matang, sehingga beresiko terhadap keutuhan rumah tangga nantinya yakni perceraian. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain: a) apa saja alasan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin, b) bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, c) apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama. Adapun metode pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah metode pendekatan yurisis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin karena hubungan yang sudah terlanjur dekat antara keduanya dan ditambah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama saat pasangan ingin melaksanakan perkawinan dengan usia mereka yang belum mencukupi batas minimum usia perkawinan. Pelaksanaan dispenasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang diajukan melalui permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdictio voluntaria* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan. Sementara itu, yang menjadi faktor pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin adalah mengutamakan prinsip menolak mudharat dari pada mengambil kemashlahatan bagi permohonan yang dikabulkan dan terhadap permohonan yang ditolak didasarkan atas pertimbangan bahwa pemohon tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalilnya dalam persidangan di pengadilan.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Pelaksanaan di Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta bimbingan kekuatan lahir batin, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dispenasasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang”**. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat kepada Mama, Papa, Kak Nita, Bang Hendra dan keluarga besar lainnya di Bukittinggi yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta do'a kepada Penulis selama ini.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, SH. MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Bapak Dr. Kurnia Warman, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

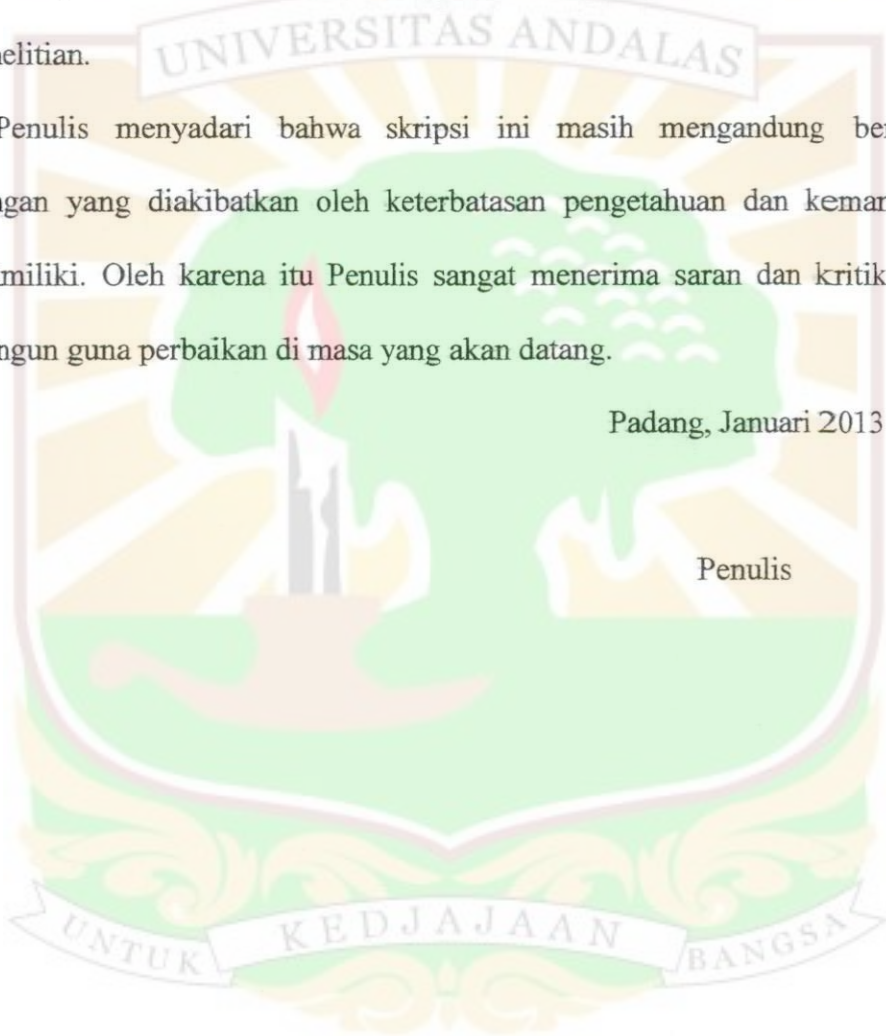
2. Bapak Syahrial Razak, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
3. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Yaswirman, SH. MA dan Pembimbing II Bapak Drs. Ali Amran, SH. MH yang telah sabar membimbing, memberikan masukan dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Jajaran Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada Penulis
5. Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Andalas atas pelayanan yang telah dibeirkan selama perkuliahan.
6. Teman-teman angkatan 2009 khususnya teman-teman lokal 1.3 Fakultas Hukum Universitas Andalas Mega (makasi infonyo mek, dak do kawan kayak lu yang bela”n datang ka teh mancaliak seminar w,,,,,,,,,terharu), Sonya (kawan manggalaw proposal), Tria (kawan ciek pembimbing), Celi n Mike (walau dak dakek na lae kini” sajak lian jadi nak HI ko e, tapi makasih untuk tahun” pertamo w d kampus) dan kawan-kawan kampus lain (yang dak bisa disabuikan ciek2 mengingat keterbatasan karateh/ go green).
7. Andin (makasih atas dorongannya) dan kawan dari SMA N 2 Bukittinggi, SMP N 1 Banuhampu, SD N 38 Cingkariang sampai kawan di TK Arraudah Jambu Aia (makasih telah menjadi teman selama ini).
8. Aan (selaku teman sekamar di kosan tercinta), Pimpong n Inggrong (selaku tempat mencurahkan kepenatan dan makasih atas kontribusinya dalam mengatasi rasa lapar) n anak kos HIMAKOMI yang lain.

9. Kawan” di Andalaswara Choir (makasih atas warna kehidupan diluar perkuliahannya, ilmu vokal bagi pelatih2 yang telah berjasa, pengalaman berorganisasi dan keluarganya), ANDALASWARA-WE ARE! !!!!!!!.
10. Keluarga Besar Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang telah memberikan bantuan, arahan serta keramah-tamahan selama Penulis melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung berbagai kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu Penulis sangat menerima saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, Januari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Asas Perkawinan.....	14
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Permohonan Masuk Tahun 2011-2012

Tabel 2 : Daftar Perceraian Kawin Bawah Umur Tahun 2008-2011



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, diawali dari adanya ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan, yakni melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qura'an dan hadis Nabi.¹ Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”.²

Pendapat Isnawati Rais dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, bahwa :

Perkawinan (*az-zawjiyah*) adalah salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam surat adz-Dzariyat/51:49, misalnya Allah berfirman, “Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, agar kamu sekalian berfikir”. Berikutnya dalam surat Yasin/36:39, dikemukakan, “Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, maupun diri mereka sendiri, dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”.³

Terkandung dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah”. Dari

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.35.

² *Ibid.*, hal.36.

³ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, 2006, hal.51.

sebuah perkawinan maka akan lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sebagaimana pengertian di atas. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Faktor yang mendukung kesiapan mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga bisa di lihat dari umur ke dua belah pihak. Hal ini melihat seberapa besar keduanya mampu mengemban tanggung jawab yang akan dihadapi nantinya setelah menikah, juga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti hubungan rumah tangga yang tidak harmonis bahkan lebih parah lagi terjadinya perceraian.

Umur termasuk pra syarat sebelum melaksanakan suatu perkawinan, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, yang mana hal ini juga di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal para pihak tidak belum cukup umur, maka bisa dilaksanakan melalui dispensasi kawin yang dapat dimintakan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama oleh orang tua salah satu pihak. Fenomena kawin di bawah umur bukanlah hal yang tabu untuk diketahui dewasa ini. Maraknya pergaulan bebas antara remaja dewasa ini dengan tidak adanya kontrol diri maupun luar diri remaja, sehingga untuk berfikir melanjutkan hubungan ke dalam suatu tali pernikahan bukan suatu hal yang sulit untuk mereka tembus. Usia remaja, merupakan usia di mana tingkat kematangan psikologis seorang manusia itu baru masuk tahap awal. Hal ini dari faktor pengalaman hidup mereka yang masih baru, sehingga ditakutkan dengan adanya kawin di bawah umur, mereka pelaku kawin di bawah umur tidak mampu mengenyampingkan emosi mereka terhadap hal-hal yang beresiko mengganggu keutuhan rumah tangga mereka nanti.

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.⁴

Pihak-pihak berkepentingan dilarang membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan mewujudkan suasana rukun dan damai, dalam rumah

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ANDI, Yogyakarta, 2009, hal. 31-32.

tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud ini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.⁵

Jelaslah bahwa adanya pertentangan dari pengaturan terkait batasan umur dalam melakukan perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan asas perkawinan bahwa bagi calon suami isteri haruslah masak jiwa raganya dan hubungannya terhadap terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga, untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin.

Untuk itu, perlu sikap antisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang buruk akan terjadi apabila sebuah perkawinan tidak dipenuhi oleh kesiapan lahir batin para pihak yang akan melakukan perkawinan. Begitu juga bagi penegak hukum yang akan menerima dan memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama nantinya, mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan masyarakat.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 11.

Tidak adanya pengaturan dalam hal apa saja suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur dapat dipertimbangkan, sehingga dibutuhkan tolak ukur yang menjadi pegangan bagi penegak hukum nantinya dalam menerima perkara yang diajukan. Apakah didasari alasan murni keinginan para pihak yang telah menjalin hubungan terlalu dekat dan terhalang oleh umur mereka yang belum mencapai standar minimal atau alasan lain.

Seperti permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama lain, hal ini juga ditemukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa saja alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
3. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah di yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum perkawinan tidak hanya bagi penulis dan pihak terkait dengan hal ini, tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai dispensasi kawin di bawah umur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang terkait dengan masalah dispensasi kawin di bawah umur.

- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama.
- c. Penelitian ini juga diharapkan pembaca dapat menjadi antisipasi akan hal-hal buruk dari suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur mengingat belum adanya kematangan dalam menyikapi hidup ini.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan tercapai sebagaimana mestinya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidenstifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶

2. Sumber data

Data- data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105.

- 2) Buku- buku milik penulis dan bahan- bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁷

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁸ Dalam hal ini adalah wawancara penulis dengan Hakim, Panitera yang terkait permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang, di sini para pihak tidak menjadi nara sumber karena keterbatasan yang penulis temui mengingat pengadilan menjamin keterahasiaan identitas para pihak. Laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

⁷ *Ibid.*, hal 105-106.

⁸ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

a) Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

c) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

d) Putusan Pengadilan dalam bentuk penetapan terkait permohonan dispensasi kawin di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

b. Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam hal ini adalah berkas yang masuk selama tahun 2011 sampai dengan 2012, di mana dari keseluruhan objek penelitian tersebut penulis menarik sampel dari dua berkas permohonan terbaru yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik¹¹. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 167.

6. Pengolahan data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing* dan *tabulating*. *Editing* yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Sedangkan *Tabulating* yaitu terhadap data yang didapat diolah dalam bentuk tabel, dalam hal ini terhadap berkas permohonan dispensasi kawin yang masuk periode 2012-2012 serta terhadap data perceraian kawin di bawah umur periode 2008 sampai dengan 2011.

7. Analisa data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat- kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul “Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang”, maka penulis memberikan uraian tentang ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II diuraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, tinjauan umum tentang asas perkawinan, tinjauan umum tentang rukun dan syarat perkawinan, tinjauan umum tentang hukum melakukan perkawinan, tinjauan umum tentang batas usia perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi kawin.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian, yaitu mengenai alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang, pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang, faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan itu dan juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa (etimologi) kata perkawinan atau nikah berarti “penyatuan”, dan dipakai juga dengan arti (1) “hubungan badan” dan (2) akad, atau kedua-duanya. Adapun menurut istilah syariat (terminologi), perkawinan atau nikah berarti “akad perkawinan” (*‘aqadat-tazwij*). Pengertian inilah yang dipakai Quran dan Hadis Rasulullah SAW.. Sedangkan yang dimaksud dengan *tazwij* menurut syariat adalah “akad yang membolehkan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan, apakah itu berhubungan badan berdekatan tanpa batas,,,,,”.¹² Di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan mengenai pengertian bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan dari pandangan hukum islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 KHI, bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

¹² Isnawati Rais, *Op.Cit.*, hal.54.

2. Asas Perkawinan

Asas perkawinan yang tercantum dalam UU perkawinan adalah sebagai berikut :¹³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Lain halnya prinsip monogami dalam Hukum Perdata/BW itu diberi sanksi oleh Hukum Pidana yang melarang bigami dan poligami, seperti disebutkan pada Pasal 279 dan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua pasal ini menentukan bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi atau mengawinkan orang yang berada dalam status perkawinan.¹⁴

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyatalah bahwa atas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan lajunya kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang

¹³ Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal.47-48

¹⁴ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU.Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1993, hal.10.

ini menentukan batas umur kawin baik pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹⁵

Rukun perkawinan :¹⁶

- a. Adanya calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Seseorang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan adalah menurut susunan berikut ini :

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dengannya
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya

- c. Adanya 2 (dua) orang saksi.

Wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut :

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal 59.

¹⁶ H.Sulaiman Rasjid dalam *Pelaksanaan Pperkwainan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Provinsi Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2010, hal 17.

- 1) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi
 - 2) Baliqh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Adil
- d. Sighat (Akad)

Sighat (Akad), yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Perkataan dari pihak wali perempuan, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....”, dijawab oleh mempelai laki-laki, “ Saya terima menikahi.....”.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6, yaitu :¹⁷

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wakil, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 2-3.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan dalam Pasal 2 UU ini, yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya perkawinan tidak berdasar dicatatkan atau tidaknya perkawinan itu. Namun dengan adanya pencatatan perkawinan, akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.¹⁸

Lain halnya syarat perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari : Pertama syarat materiil terdiri dari : Syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Kedua syarat formal. Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil absolut adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari :¹⁹

¹⁸ Tersedia di <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-t,Kepastian+Hukum+%E2%80%9CItsbat+Nikah%E2%80%9D+Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx>, diakses tanggal 7 Januari 2013.

¹⁹ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal 3-4

- a. Monogami.
- b. Persetujuan antara kedua calon suami istri.
- c. Memenuhi syarat umur minimal.

Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan Undang-undang, yaitu laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun.²⁰

- d. Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan.
- e. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil yang relatif, yang terdiri dari :²¹

- a. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- b. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.
- c. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan ialah :²²

- a. Para pihak harus menyatakan niatnya sebelum kepada Pegawai Catatan Sipil.
- b. Pernyataan atau pemberitahuan itu harus diumumkan oleh Pegawai Catatan Sipil di Gedung Catatan Sipil, dan pengumuman itu berlangsung selama 10 hari.
- c. Bila calon suami istri tinggal di dua tempat, maka pengumuman diadakan di dua tempat.

²⁰ Bakri A Rahan dan Ahmad Sukardja, *Op.Cit.*, hal 42.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal.43.

- d. Bila salah satu pihak baru berdiam selama enam bulan di tempat yang baru, maka pengumuman diadakan di tempat lama dan baru.
- e. Perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah 10 hari sejak pengumuman, dan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengumuman itu.

Sahnya perkawinan menurut KUHPer, sebagaimana pernyataan Bakri A Rahman dan Ahmad Sukarja, yaitu :

“ Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku, maka perkawinan adalah sah, dalam arti bahwa perkawinan itu legal, menurut Undang-undang”²³

Sedangkan menurut pandangan hukum islam, sahnya perkawinan hukumnya sah, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun perkawinan ialah

²⁴

- a. Adanya calon suami dan calon istri
- b. Adanya akad
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi

Syarat calon suami :

- a. Bukan mahrom, baik karena hubungan darah, karena persusuan dan semenda.
- b. Tidak beristri empat orang

²³ *Ibid.*, hal.41.

²⁴ *Ibid.*, hal.23-24.

- c. Dengan kemauan sendiri, bukan dipaksa,
- d. Tertentu orangnya.
- e. Seorang laki-laki, bukan wadam.
- f. Mengetahui calon istrinya.
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram atau umrah
- h. Seorang muslim

Syarat calon istri :

- a. Bukan mahrom, baik karena pertalian darah, karena persusuan atau semenda.
- b. Tidak istri orang.
- c. Tidak dalam massa iddah suaminya.
- d. Tidak dipaksa, jadi dengan kemauan sendiri.
- e. Seorang muslimah atau seorang perempuan ahli kitab
- f. Jelas ia seorang perempuan, bukan banci.
- g. Tertentu orangnya.
- h. Ia tidak sedang ihrom atau 'umrah.
- i. Tidak bersaudara, baik karena sedarah, sesusuan maupun karena semenda (apabila ia dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat).

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang

sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah.²⁵

Di dalam hukum islam terdapat tingkatan atau penggolongan hukum yang lima macam, yang disebut “al-ahkam al-khomsah”, yaitu ibahah (mubah), sunnah, wajib, makruh dan haram. Kelima macam hukum tersebut berlaku bagi hukum melakukan kawin yang dilakukan seseorang.²⁶

a. Mubah

Hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah ialah mubah. Tiap orang yang memenuhi syarat perkawinan, mubah atau boleh atau halal yang melakukan kawin.

b. Sunnah

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniah dan rohaniyah, sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin, serta mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga, disunnahkan untuk melakukan kawin.

c. Wajib

Bila seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak sekali untuk kawin, kedewasaannya rohaniyahnya sempurna, memiliki biaya kehidupan yang cukup, dan bila tidak kawin akan jatuh keperbuatan tercela (zina), maka ia wajib melakukan kawin.

d. Makruh

Jika seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaniyahnya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup isterinya, maka ia dimakruhkan untuk kawin.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.43

²⁶ Bakri A Rahan dan Ahmad Sukardja, *Op.Cit.*, hal

e. Haram

Seseorang yang akan mengawini wanita dengan maksud menyakiti, manganiaya atau mempermainkannya, maka ia diharamkan mengawini wanita itu.

5. Batasan Usia Perkawinan

Batas Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan walaupun menurut Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan.

Namun terdapat ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, yakni firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

“ Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin ”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

“ Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah ”. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.²⁷

Sebagaimana pernyataan yang dikutip dari Amir Syarifuddin dalam bukunya yang menyatakan bahwa, Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya (Ibnu Rusyd,3), bahkan UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh.²⁸

²⁷ Amir Syarifuddin, Op.Cit., hal.67.

²⁸ *Ibid.*, hal.65.

UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur. tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”²⁹

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam, yaitu :

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.³⁰

Sedangkan KUHPerdara dalam Pasal 29 menentukan,

“Setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita yang belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting

²⁹ Putri Utami, *Analisis Yuridis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2010, hal.13-14.

³⁰ Tersedia di <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2241188-batas-usia-dalam-syarat-pernikahan/#ixzz1t3WPmkse>, diakses tanggal 25 April 2012.

Presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi.”³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

Roihan A. Rasyid berpendapat, bahwa :

“Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan. Dan jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.”³²

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa :

Undang-undang menentukan batas umur kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).³³

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, yaitu :³⁴

1. Pasal 12 menitik beratkan pada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni :
 - a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum,yaitu :

³¹ Tersedia di

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.htm, diakses tanggal 25April 2012.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 32

³³ Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Op.Cit.*, hal.38.

³⁴ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal.42-44.

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 - c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
 - d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
3. Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, Pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut :
- a. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.
 - b. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
 - c. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
 - d. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.
4. Pasal 16 mengatur tentang dispensasi bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan perkawinan campuran, yaitu :
- a. Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan pernikahan campuran, diperlukan surat keterangan dari pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Undang-undang Perkawinan.
 - b. Surta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut agama islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung selain Badan Peradilan lain yakni, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (3) dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu meliputi: Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk salah satu jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Permohonan diajukan dengan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Agama di tempat tinggal pemohon. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdictio voluntaria* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan.

Alasan pengajuan permohonan dikenal juga dengan istilah posita, yaitu tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohonkan oleh pemohon. Dalam Undang-undang tidak di atur alasan atau dalam hal apa saja suatu permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan. Namun dari penelitian yang dilakukan di lapangan yakni Pengadilan Agama Kelas IA Padang, terdapat tiga permohonan yang masuk dan sudah diputus terhitung dari tahun 2011-2012. Selanjutnya akan dirinci dalam tabel di bawah.

Tabel 1

Daftar Permohonan Masuk Tahun 2011-2012

No	Tahun Masuk Permohonan	Bulan Masuk Permohonan	Permohonan Diterima	Permohonan Ditolak
1.	2011	Agustus	√	
2.	2012	Januari	√	
		Januari		√

Sumber : www.papadang.go.id

Dari tiga permohonan di atas, penulis mengambil sampel dari dua permohonan terbaru yang masuk pada tahun 2012. Masing-masing dengan nomor perkara 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg dan 13/Pdt.P/2012/PA.Pdg (terlampir), dapat dipahami bahwa umumnya alasan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, antara lain :

a. Hubungan Dekat antar Calon Mempelai

Hubungan dekat antara calon mempelai di sini adalah pihak laki-laki maupun perempuan telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup lama, sehingga dari hubungan tersebut mereka berfikir untuk menjalin hubungan lebih lanjut dalam suatu tali pernikahan antara keduanya guna terhindar dari perbuatan yang menyimpang seperti zina serta mudharat lainnya yang memungkinkan timbul, bila niat mereka tidak terlaksana. Gambaran ini menurut penulis merupakan suatu potret kurangnya kontrol baik dari pihak maupun orang terdekat mereka dalam membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong bagi para pelaku perkawinan di bawah umur yang penulis temui, antara lain :

1) Faktor Pendidikan

Dengan perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, sudah tentu dari segi pendidikan para pelaku belum memiliki pemikiran yang matang layaknya seorang yang sudah dewasa dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Para pelaku adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Putus sekolah disini tidak lepas dari faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu menyekolahkan mereka.

Para wali atau orang tua harus memberikan kesempatan kepada anaknya dalam menuntaskan masa sebelum remajanya untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Serta mencari pengalaman

bersama teman-temannya, baik di bangku sekolah atau luar sekolah, sebelum ia bekerja atau menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuannya, supaya ia bisa mengetahui makna dari kehidupan setelah ia belajar dan memperoleh pengalaman. Perempuan yang menikah dan belum cukup umur, ia akan mengalami sekian banyak kesulitan dalam hidup. Sebab, ia belum mengetahui dan memahami metode-metode dalam rumah tangga, menjadi isteri yang baik, mengurus anak serta bertanggung jawab ketika menjadi seorang isteri.³⁵

Pemikiran yang matang tidak hanya disokong oleh ilmu yang didapat di jenjang pendidikan saja, tetapi juga oleh pengalaman hidup. Seseorang yang sudah dewasa secara umur sudah tentu memiliki pengalaman hidup yang panjang, dengan begitu mereka mampu mengendalikan permasalahan hidup mereka secara dewasa dengan tidak menuruti ego mereka layaknya seorang remaja yakni, pelaku perkawinan di bawah umur yang dengan mudahnya beranggapan bahwa, menjalani suatu kehidupan rumah tangga suatu hal yang gampang tanpa memperhitungkan resiko di kemudian hari.

Seperti diketahui bahwa banyak hal yang akan timbul dalam perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis ini. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga misalnya, hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologis. Demikian pula segi-segi atau masalah-masalah yang lain.

³⁵ Wiwi Alawiyah Wahid, *Kesalahan-kesalahan Seputar Tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi*, SABIL, Yogyakarta, 2012, hal 82-83.

Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.³⁶

2) Faktor Ekonomi

Tinjauan dari segi ekonomi di sini terdapat dua kesimpulan bahwa, Pertama para pelaku berlatar pendidikan rendah ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung anak mereka bersekolah lebih lanjut, sehingga menjadi putus sekolah. Kedua dengan putus sekolah mereka itu memilih bekerja, dan disertai hubungan yang sudah terjalin dengan lawan jenis mereka sehingga pelaku merasa sudah memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan keluarga mereka nanti. Pekerjaan pelaku dengan latar belakang yang rata-rata tamat SMP tersebut, mayoritas bukanlah pekerjaan yang menjanjikan layaknya seorang yang bekerja dengan title atau gelar dari perguruan tinggi.

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk

³⁶Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.³⁷

3) Faktor Kontrol/Pengawasan

Faktor kontrol yang penulis maksud adalah baik kontrol dari dalam diri maupun dari luar para. Faktor kontrol diri ini akan didukung tingkat keimanan pribadi manusianya sendiri, tingkat keimanan bukanlah suatu hal yang bisa di hitung secara nominal, namun dengan pemahaman akan agama yang ada padanya sudah tentu akan menjadi hal yang mampu menghindari para pihak dari perilaku yang tidak baik.

Demikian juga halnya jika dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing anggota pasangan akan memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Banyak tindakan yang dapat dicegah pelaksanaannya karena dilatarbelakangi oleh kuatnya agama yang dianutnya³⁸. Dewasa ini penanaman nilai agama sudah mulai berkurang perannya baik di dalam keluarga, sekolah maupun lembaga agama lainnya. Hal ini disebabkan karena perkembangan di bidang teknologi dan informasi yang mampu membawa pengaruh besar terhadap kepribadian dan tingkah laku para remaja. Perilaku budaya barat itulah yang marak ditiru oleh para muda-mudi Indonesia sekarang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 53-54.

ini. Sehingga Indonesia dengan Budaya Timur-pun menjadi luntur karenanya.

Peran orangtua jika dikaitkan dengan Pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak 2002 bahwa, anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan menyebutkan, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Jadi, secara tegas di atur peran orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengawasi anak-anak mereka terutama dalam membatasi pergaulan anak dari hal-hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka, serta dalam hal pemenuhan hak anak di bidang edukasi, pengembangan bakat dan minat si anak. Maka sudah sepantasnya orang tua mengambil peran lebih terdepan sebelum penegak hukum yang mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, mengingat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan pada umumnya dapat dikabulkan di muka Pengadilan.

- b. Belum Mencapai Umur Minimal yang Diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Selanjutnya dalam Pasal yang sama di atur bahwa “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dari kasus yang dikabulkan ini terdapat sedikit hal yang menjanggal dari yang biasanya, yakni pihak calon suami lebih muda 3 tahun dari pihak calon isterinya. Hal tersebut pada umumnya kurang disarankan, karena apabila keadaan ini dapat ditinjau maka perkembangan psikologis dari isteri jauh akan mencapai kematangan lebih dahulu sehingga dengan demikian besar kemungkinannya pandangan, sikap maupun pendapat mengenai sesuatu akan menjadi jauh berbeda.³⁹ Tetapi ini tidak berarti bahwa pasangan yang isterinya lebih tua tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan. Kebahagiaan memang tidak terletak pada perbedaan umur antara suami isteri. Namun kalau isteri lebih tua dari suami, kemungkinan timbulnya permasalahan dalam keluarga akan lebih mudah terbuka.⁴⁰

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dalam hal belum mencapai batas umur minimal inilah yang menyebabkan adanya penolakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) bagi

³⁹ *Ibid.*, hal.33.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.34.

para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Penolakan tersebut yang akan menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin nantinya di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undnag Perkawinan.

B. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi terhalang karena belum mencapai batas umur minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, maka ia dapat megajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua mereka.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya, bahwa permohonan Dispensasi Kawin adalah termasuk salah satu jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Permohonan diajukan dengan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdictio voluntaria* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan.

Ada dua tahap yang akan dijalani dalam pelaksanaan permohonan Dispensai Kawin melalui Pengadilan Agama, yaitu :

1. Tahap mengajukan permohonan
 - a. Meja I (orang yang bersangkutan/kuasa)

Tahap ini merupakan tahap pendaftaran perkara secara lisan/tulisan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama
- 2) Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)
- 3) Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)
- 4) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
- 5) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin

b. Kasir/bank

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui, antara lain :

- 1) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Meja 1 Kantor Pengadilan Agama

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang –undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴¹ Selanjutnya kasir akan menuangkannya dalam Surat

⁴¹ Tersedia di http://www.pa.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55, di akses tanggal 22 November 2012.

Kuasa untuk Membayar (SKUM). Rincian biaya perkara terdiri dari :

- a) Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- b) Biaya pemeriksaan Rp 50.000,-
- c) Biaya panggilan (d disesuaikan dengan berapa kali pemanggilan terhadap para pihak)⁴²
- d) Biaya redaksi Rp 5.000,-
- e) Biaya materai Rp 6.000,-

Rincian di atas nantinya akan dijumlahkan dan dicantumkan dalam Penetapan untuk dipenuhi Pemohon. Namun dalam hal para pihak tidak mampu, maka akan diadakan sidang secara *prodeo* (Cuma-cuma) dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat di wilayah tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya Pemohon dibebaskan dari biaya perkara yang nantinya akan dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

- 2) Setelah urusan pembayaran administrasi selesai berdasar SKUM yang telah di setor ke bank, maka Kasir akan menandatangani dan memberi nomor urut dan tanda lunas pada SKUM.
- 3) Permohonan dan SKUM tersebut akan dikembalikan lagi kepada Pemohon.

⁴² Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Padang Bapak Drs. Warnelis Watmah,SH pada tanggal 20 November 2012.

c. Petugas Pengadilan

- 1) Pencatatan permohonan oleh Petugas Pengadilan ke dalam registrasi oleh Meja II
- 2) Setelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Panitera secepatnya menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, disertai “usul tindak” atau “saran tindak”. Atas dasar itu, Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili, yang mana akan dituangkan dalam surat, disebut “Penunjukan Majelis Hakim” (PMH). Penunjukan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- 3) Penunjukan Panitera

Panitera sidang, jika dalam PMH belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis. Bila sesewaktu karena berbagai sebab, harus terjadi pergantian hakim maka PMH semula harus dicabut/diganti dengan PMH baru.⁴³ Lain halnya dalam hal pergantian Panitera, maka boleh saja tidak dituangkan dalam suatu Surat Penetapan, sebab Panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang, namun sebaiknya ada semacam surat tertulis guna pegangan bagi Panitera sidang tersebut.⁴⁴

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, hal.79.

⁴⁴ *Ibid.*, hal.78-79.

4) Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis

Ketua majelis akan membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai dan berdasar surat penetapan tersebut akan dilakukan pemanggilan pada para pihak untuk menghadiri persidangan. Penetapan hari sidang dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja.

2. Proses penyelesaian permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

a. Sidang

Setelah tahapan pengajuan permohonan dan memenuhi persyaratan administrasi pada petugas Pengadilan Agama, akan dilanjutkan pada tahap persidangan dengan rincian sebagai berikut :

1) Pemanggilan pihak

Sebagaimana hari, jam dan tempat persidangan yang ditetapkan Ketua Majelis, maka para pihak akan dipanggil untuk menghadap ke muka persidangan. Pemanggilan yang dilakukan haruslah dilakukan secara patut. Surat panggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil. Dalam hal pihak dapat ditemui, surat panggilan dapat disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Dan sebelum hari persidangan kepada para

pihak diperintahkan untuk mempersiapkan bukti-bukti guna pemeriksaan di persidangan nantinya, biasanya para pihak mengajukan bukti-bukti tersebut kepada Panitera sebelum hari persidangan.

2) Sidang

Di hari pertama sidang, sesaat sebelum persidangan dimulai Panitera akan mempersiapkan segala sesuatu demi kelancara persidangan nantinya, setelah siap akan dilaporkan pada Ketua Majelis. Dan persidangan pun siap di mulai dengan tahapan berikut :

a) Majelis Hakim memasuki ruang sidang, selanjutnya Panitera mempersilahkan hadirin untuk berdiri dan saat Hakim duduk, hadirin dipersilahkan duduk kembali.

b) Ketua Majelis membuka sidang disertai dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” secara bersama melalui persidangan yang terbuka untuk umum.

Untuk sidang tertutup dimungkinkan alasan khusus yang diajukan para pihak dan harus dengan Penetapan Sela.

Kemungkinan hal yang dapat ditemui dalam sidang untuk pertama kali pemohon tidak hadir dan telah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya, maka permohonan akan diputus gugur. Namun jika pemohon pada sidang pertama hadir, dan sidang selanjutnya tidak hadir maka

permohonan tidak bisa digugurkan, melainkan persidangan berjalan dengan acara biasa dan tanpa bantuan pihak yang mengajukan permohonan.

c) Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis akan menanyakan identitas Pemohon dan terkait ada atau tidaknya hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para Hakim dan Panitera yang menyidang.

d) Selanjutnya Hakim akan memberi nasehat pada para pihak terkait beberapa hal, yakni⁴⁵:

- Menasehati para pihak untuk menunda pernikahan mereka sampai mencukupi batas usia, sebagaimana yang ditentukan UU Perkawinan
- Akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan
- Resiko yang akan dihadapi para pelaku kawin muda nantinya setelah menikah
- Tanggung jawab yang akan diemban para pihak setelah menikah

e) Pembacaan Surat Permohonan oleh Ketua Majelis

f) Pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan yang dilakukan secara bergantian oleh Majelis Hakim kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon untuk memperoleh keterangan yang dapat dipertimbangan hakim dalam mengeluarkan Penetapan di akhir persidangan.

g) Jika dalam sidang pertama Pemohon belum siap dengan alat bukti yang mereka ajukan, maka sidang akan ditunda

⁴⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang Ibu Dra. Helmawati Khas pada tanggal 20 November 2012.

satu minggu kedepan terhitung sidang pertama dimulai. Namun bila alat bukti surat/tertulis telah dipersiapkan, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti surat/ tertulis tersebut. Jika dirinci lagi, yang menjadi alat bukti surat/tertulis dalam permohonan dispensasi kawin ini, adalah :⁴⁶

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon
- Akta kelahiran anak pemohon yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur
- Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal pemohon

h) Tahapan selanjutnya sidang akan diskors untuk musyawarah penetapan oleh Ketua Majelis dan diikuti dengan para pihak yang keluar dari ruang sidang. Setelah musyawarah tercapai, perintah diskors dicabut dan para pihak kembali memasuki ruang persidangan yang selanjutnya untuk pembacaan penetapan.

i) Sidang ditutup oleh Ketua Majelis, dan pada para pihak dipersilahkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas terhadap penetapan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang Ibuk Dra. Helmawati Khas pada tanggal 20 November 2012.

⁴⁷ Tersedia di <http://www.pabondowoso.com/statis-39-dispensasi-kawin.html>, diakses tanggal 21 November 2012.

b. Meja III (Penyelesaian Perkara)

Setelah persidangan selesai, dilanjutkan dengan pengambilan salinan Penetapan, guna memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan nantinya yang akan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggal Pemohon. Hal ini juga disertai dengan pengambilan berkas perkara oleh Pemohon.

C. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Bagi Hakim dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁴⁸

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Dari

⁴⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 Nomor : 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

segi sifat akibat hukum yang ditimbulkan dari Penetapan Hakim dalam permohonan dispensasi kawin, ia tergolong putusan *Diklaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan”.

Pertimbangan hakim merupakan dasar nantinya dalam hal pengambilan suatu putusan maupun penetapan. Baik itu pertimbangan dari fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, serta pertimbangan keadilan masyarakat yang ingin memperoleh haknya yang sama di mata hukum. Begitu juga halnya pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Berdasarkan dua permohonan yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu permohonan No. 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg dan No. 13/PdT.P/2012/PA.Pdg. Kedua permohonan tersebut memperoleh penetapan berbeda dengan pertimbangan yang berbeda pula. Sebagaimana wawancara penulis dengan hakim yang telah memutus, ada hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan dan menolak permohonan tersebut.

a. Dikabulkannya permohonan

Dapat dikabulkannya suatu permohonan Dispenasasi Kawin, penulis berkesimpulan dari pertimbangan yang terdapat dalam permohonan No. 13/PdT.P/2012/PA.Pdg, yang ditemukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ini. Yang pertama pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum, yakni bukti-bukti yang dapat dihadiri pemohon selama persidangan, antara lain :

1) Bukti tertulis/surat

Terdapat fakta hukum yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dalam persidangan, antara lain :

- a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya
- b) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon
- c) Surat Asli Penolakan Pernikahan terhadap anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan berdasar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama tempat tinggal wilayah Pemohon

2) Saksi (Keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon)

Fakta hukum yang didapat dari bukti surat di atas, diperkuat dengan keterangan yang didapat dari Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon. Keterangan tersebut diperoleh dari pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim secara bergantian terhadap mereka. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan tentang hukum dan dasar hukum penetapan permohonan No.

13/PdT.P/2012/PA.Pdg, yang bunyinya sebagai berikut : “
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan suami Pemohon yang bernama M.SAWIR bin MAK DINA , anak Pemohon yang bernama TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon sudah siap baik

secara fisik maupun mental untuk menikah dengan seorang perempuan MALINI binti BURHANIS karena anak Pemohon sudah punya penghasilan sebaesar Rp 50.000 perhari;"

Kesaksian yang diberikan dalam Dispensasi Kawin ini hanyalah dalil-dalil/keterangan yang dijadikan penguat bagi permohonan Pemohon, selain guna pertimbangan bagi hakim dalam mengeluarkan penetapan nantinya.

3) Keyakinan Hakim

Selanjutnya, hal ini diperkuat atas prinsip mengutamakan menolak kemudharatan.⁴⁹ Sebagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan No. 13/PdT.P/2012/PA.Pdg ini, yang bunyinya sebagai berikut : " Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang telah menjalin hubungan saling cinta mencintai dengan calon isterinya susah dipisahkan dan dengan prinsip mengutamakan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan:"

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang Ibuk Dra. Helmawati Khas pada tanggal 20 November 2012.

Pertimbangan hakim di sini, tidak terlepas dari ketentuan bahwa hakim bebas menafsirkan Undang-undang dengan menggali nilai-nilai yang ada dimasyarakat, sebagaimana terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Selain untuk menghilangkan kemudharatan, Hakim akan melihat apakah dengan dikabulkannya permohonan terdapat larangan perkawinan atau tidak. Hal ini akan di rujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, yang mengatur tentang larangan perkawinan, bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis eturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara saudara dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Terhadap larangan perkawinan juga diatur dalam Bab VI

Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Pasal 40

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 41

- (1) Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj’i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj’i atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i.”

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.

- b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

b. Ditolaknya permohonan

Dari penelitian yang dilakukan, hal yang menyebabkan ditolaknya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya selama persidangan, yakni pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti sebagai alat memperkuat dalil-dalilnya sebagaimana terdapat dalam permohonan. Hal ini dapat di lihat dari penetapan permohonan No. 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg, yang kutipan pertimbangan hukumnya berbunyi :

- a. Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir satu kali pada sidang pembacaan permohonan dan pada waktu sidang tersebut Pemohon belum siap dengan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi sehingga ditunda untuk pembuktian, namun pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang ke persidangan, yang akhirnya Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, sedangkan kepada Pemohon telah diberikan waktu dan kesempatan bahkan kepada Pemohon telah dilakukan

pemanggilan dengan sah, namun Pemohon tidak menggunakan waktu tersebut;

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Penetapan ini termasuk jenis putusan, yang dari segi hadir tidaknya para pihak saat putusan dijatuhkan disebut juga dengan putusan *Contradiktoir*, yakni putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dari kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang ditetapkan ditolak ini, penulis berpendapat bahwa ditolaknya permohonan Pemohon disebabkan tidak terbuktinya permohonan Pemohon karena tidak menghadiri persidangan selanjutnya. Dapat dilihat bahwa masih lemahnya penegakan hukum dalam hal mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Apakah jika para pihak akan menghadiri sidang sesuai prosedurnya seperti permohonan yang dikabulkan lainnya, permohonan ini akan dikabulkan juga.

Belum lagi pertimbangan terhadap resiko yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga, yakni perceraian. Hal ini penulis temukan sendiri di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, di mana terdapat beberapa kasus perceraian di bawah umur yang penulis temui melalui

grafik perceraian berdasar usia para pihak. Selanjutnya dapat dilihat melalui tabel di bawah yang sudah penulis olah.

Tabel 2

Daftar Perceraian Kawin Bawah Umur Tahun 2008-2011

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2008	8
2.	2009	2
3.	2010	3
4.	2011	2

Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵⁰

Penegak hukum yang seharusnya menjadi pemegang tongkat terakhir dalam memutus boleh tidaknya sepasang muda-mudi melakukan perkawinan di bawah umur, justru memberi celah bagi para pelaku, sehingga untuk menerobos hukum saja menjadi anggapan enteng bagi

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.13

pelaku, yang menurut penulis hanya semata-mata menuruti ego dan nafsu mereka saja untuk tetap melangsungkan kawin di bawah umur.

Perlu diingat bahwa para pelaku kawin di bawah umur, secara ekonomi tidak akan terlepas dari pengaruh orang tua mereka, dengan kata lain masih bergantung kepada orang tua mereka. Sebagaimana permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 13/Pdt.p/2012/PA.PDG (terlampir), di mana ayah pelaku menyatakan akan menanggung resiko akibat perkawinan anaknya. Hal ini dikarenakan belum adanya kemandirian secara finansial yang matang masing-masing pelaku dalam berumah tangga. Terutama soal tempat tinggal yang seharusnya wajib dipenuhi suami bagi isteri dan anaknya nanti, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”. Berumah tangga dengan hidup serumah bersama orang tua, maka rumah tangga tersebut tidak akan luput dari campur tangan orang tua maupun keluarga lain. Apalagi dalam penyelesaian konflik rumah tangga, yang seharusnya kedua pihak dituntut bijak dan mandiri dalam menyelesaikan masalah mereka.

Sehingga kedepannya diharapkan adanya antisipasi terutama bagi penegak hukum yakni Hakim terhadap penyelesaian permohonan dispensasi kawin. Hal ini semata-mata menjaga kesakralan dari perkawinan, serta untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri,

yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Hubungan dekat antara calon mempelai di sini adalah pihak laki-laki maupun perempuan telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup lama, sehingga dari hubungan tersebut mereka berfikir untuk menjalin hubungan lebih lanjut dalam suatu tali pernikahan. Hal ini guna terhindar dari perbuatan yang menyimpang seperti zina serta mudharat lainnya yang memungkinkan timbul, bila niat mereka tidak terlaksana. Namun, di saat para pihak berniat melaporkan keinginan mereka untuk menikah ke KUA dan mereka belum mencapai batas umur minimal, sehingga menyebabkan adanya penolakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Penolakan tersebut yang akan menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin nantinya di Pengadilan Agama.

2. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang diajukan melalui permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, perkara permohonan termasuk dalam pengertian *jurisdictio voluntaria* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu selanjutnya Hakim akan memberikan suatu penetapan. Hal ini dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap mengajukan perkara melalui penyelesaian urusan administrasi Pengadilan Agama dan tahap penyelesaian perkara dipersidangan yang pada sidang pertama terhadap para pihak akan diberi nasehat-nasehat seputar menunda keinginan mereka untuk menikah sampai cukup umur nantinya dan resiko dilaksanakannya kawin di bawah umur, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, musyawarah penetapan dan pembacaan penetapan.

3. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Bagi Hakim dalam Menyelesaikan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur Melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Ada hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan. Pertimbangan terhadap permohonan yang dikabulkan yakni, mengutamakan prinsip menolak mudharat dari pada mengambil kemashlahatan bagi permohonan, hal ini tidak terlepas dari kesiapan-kesiapan para pelaku kawin di bawah umur itu untuk mengemban hak dan kewajiban dalam perkawinan nantinya dan didukung bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan. Sedangkan terhadap pertimbangan permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah Pemohon tidak dapat

membuktikan permohonannya selama persidangan, dengan kata lain para pihak tidak mampu mengajukan bukti-bukti ke persidangan untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonan mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para pelaku perkawinan di bawah umur berfikir dua kali untuk tetap melangsungkan perkawinan, mengingat belum adanya kematangan baik fisik, psikis dan materil dari para pelaku yang dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang lebih jauh tantangannya dari menjalani kehidupan pacaran mereka. Hal ini perlu didukung dengan adanya kontrol diri para pelaku dengan meningkatkan keimanan mereka, menghindari dari pergaulan bebas, dan pandai memilah hal-hal baru yang patut dan tidak dari perkembangan teknologi marak merosotkan prilaku dan agama remaja dewasa ini.
2. Orang tua sebagai orang terdekat, haruslah mengawasi dan membatasi pergaulan anak mereka terutama dengan lawan jenis. Serta perlunya membangun komunikasi intensif dengan si anak, terutama pengawasan menyangkut kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga kedepannya diharapkan situasi yang terkontrol, yang mampu memberi batasan terhadap pergaulannya.
3. Kepada penegak hukum yakni Hakim sebagai pemegang tongkat terakhir penentu dapat tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dapat

dilaksanakan, haruslah mencegah hal ini guna menghindari maraknya perceraian sebagai resiko perkawinan di bawah umur itu sendiri, sebagaimana kasus yang penulis temui. Mengingat pada umumnya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama dapat dikabulkan. Sudah sepantasnya perkawinan di bawah umur untuk di cegah agar terhindar dari rusaknya keutuhan rumah tangga, sebagai akibat ketidakmatangan para suami isteri muda tadi dalam menjalani hak dan kewajibannya. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi peraturan terkait perkawinan di bawah umur dengan resiko-resiko terburuk yang kedepannya akan dihadapi para pelaku kawin di bawah umur kepada masyarakat. Dengan ini diharapkan kedepannya kasus perkawinan di bawah umur menjadi berkurang, sehingga hak anak terutama di bidang edukasi dapat berlanjut guna kesiapan dan kematangan pengalaman masa depan mereka nantinya setelah dewasa, serta siap untuk melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Arso Sostroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, PT.Hidakarya Agung, 1993.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ANDI, Yogyakarta, 2009.
- Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, 2006.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Wiwi Alawiyah Wahid, *Kesalahan-kesalahan Seputar Taha-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi*, SABIL, Yogyakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 Nomor : 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. WEBSITE

<http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2241188-batas-usia-dalam-syarat-pernikahan/#ixzz1t3WPmkse>

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.htm

<http://www.pabondowoso.com/statis-39-dispensasi-kawin.html>

http://www.papadang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-t,Kepastian+Hukum+%E2%80%9CItsbat+Nikah%E2%80%9D+Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx>.



PENGADILAN AGAMA PADANG

**JALAN DURIAN TARUNG NO. 1 BY PASS PADANG Telp. 0751-
775436**

**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



PENETAPAN

NOMOR : 13/Pdt.p/2012/PA.PDG

TANGGAL : 06 Februari 2012

**TENTANG PERKARA
DISPENSASI KAWIN**

Antara :

**DESMAWATI BINTI SAINU
(Pemohon)**

PENETAPAN
Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA.Pdg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA



Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

DESMAWTI binti SAINU umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Anyelir IV No. 02 RT 002 RW. 013 Kelurahan Dadok Tunggui Hitam Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon serta telah mempelajari bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register nomor: 13/Pdt.P/2012/PA.Pdg, tertanggal 13 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (**M. SAWIR bin MAK DINA**) telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 Desember 1981 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/21/XII/1981 tanggal 23 Desember 1981;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **SISKANDI NOVIA GUSWITA** lahir tanggal 30 Agustus 1984;
 - **WINDI JUNAIDI** lahir tanggal 06 Juni 1991;
 - **TAWFIQ HIDAYAT** lahir tanggal 02 November 1993;
 - **TEGUH KURNIAWAN** lahir tanggal 24 Agustus 1996;
 - **HASANUDIN** lahir tanggal 14 Maret 2003;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TAUFIQ HIDAYAT bin M. SAWIR** telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang perempuan yaitu:

Nama : **MALINI binti BURHANIS**;

Umur : 22 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : DIII;

Pekerjaan : Tidak ada;

Tempat tinggal di : Jl. Gajah II No. 09 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon (**TAWFIQ HIDAYAT bin M. SAWIR**) dengan **MALINI binti BURHANIS** akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan anak Pemohon (**TAUFIQ HIDAYAT**) dengan (**MALINI binti BURHANIS**) ditolak oleh KUA Padang Utara Kota Padang dengan alasan anak Pemohon selaku calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon (**TAWFIQ HIDAYAT bin SAWIR**) dengan (**MALINI binti BURHANIS**);

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**DESMAWATI binti SAINU**) untuk mengizinkan anak Pemohon (**TAWFIQ HIDAYAT bin SAWIR**) menikah dengan calon isterinya (**MALINI binti BURHANIS**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anak Pemohon mengingat anak Pemohon masih dibawah umur akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Bahwa Majelis telah mendengar keterangan suami Pemohon yang bernama **M. SAWIR bin MAK DINA**, umur 56 tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saya adalah ayah kandung dari **TAWFIQ HIDAYAT**;
- Bahwa isteri saya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak saya dengan Pemohon yang bernama **TAWFIQ HIDAYAT**;
- Bahwa saya menyetujui permohonan Pemohon;
- Bahwa umur **TAWFIQ HIDAYAT** sekarang 18 tahun;
- Bahwa saya selaku ayahnya menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **TAWFIQ HIDAYAT** masih dibawah umur, tetapi sikap dan mentalnya sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga;
- Bahwa hubungan **TAUFIQ HIDAYAT** dengan calon isterinya sudah sangat dekat, saya khawatir bila perkawinan ditunda akan mendatangkan kemudharatan;
- Bahwa saya selaku ayah akan menanggung resiko akibat perkawinan anak saya tersebut;
- Bahwa pekerjaan **TAWFIQ HIDAYAT** berjualan kelapa muda, dengan penghasilan bersih Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (**TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya (**TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR**) sekarang berumur 18 tahun, (lahir tanggal 02 November 1993);
- Bahwa saya tidak bisa dan tidak ingin menunda rencana perkawinan saya dengan calon isteri saya (**MALINI BINTI BURHANIS**) karena kami sudah saling mencintai dan kami telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon isteri saya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya sudah sama-sama ingin melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan, bila rencana tersebut masih ditunda saya khawatir kami akan melanggar norma agama, karena hubungan kami sudah begitu dekat;

- 
- Bahwa pekerjaan saya berjualan kelapa muda, saya sudah sanggup menafkahi isteri saya, dengan penghasilan bersih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama (**MALINI binti BURHANIS**) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menjadi isteri untuk mendampingi **TAWFIQ HIDAYAT** dalam rumah tangga;
- Bahwa **MALINI binti BURHANIS** mengaku sudah menjalin hubungan kasih sayang dengan **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** dan sudah saling cinta mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa **MALINI binti BURHANIS** mengetahui **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa **MALINI binti BURHANIS** sudah siap menjadi isteri dari **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** walaupun usianya lebih muda dari **MALINI binti BURHANIS**;
- Bahwa **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** calon suami saya telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi kepala rumah tangga, karena **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 50.000,- perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya (**M. SAWIR bin MAK DINA**) Nomor:257/21/XII/1981 tanggal 23 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kota Solok Provinsi Sumatera Barat yang telah dinazegellen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Padang oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** tanggal 5 November 1993 yang dikeluarkan oleh Bidan **NURMI NURDIN** yang telah dinazegellen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** dengan **MALINI binti BURHANIS** Nomor KK.03.09.3/PW.00/73/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat) bukti (P.4);



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat di dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon Dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** dengan seorang perempuan yang bernama **MALINI binti BURHANIS** sedangkan anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan suami Pemohon yang bernama **M. SAWIR bin MAK DINA**, anak Pemohon yang bernama **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan bahwa anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MALINI binti BURHANIS** karena anak Pemohon sudah punya penghasilan sebesar Rp 50.000 perhari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat P1, P2 dan P4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) Pemohon telah menikah dengan **M. SAWIR bin MAK DINA** , selama dalam perkawinan tersebut telah memperoleh anak 5 (lima) orang, salah seorangnya bernama **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR**;

Menimbang, berdasarkan bukti (P2) menerangkan bahwa anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** lahir tanggal 02 November 1993 adalah masih dibawah umur untuk menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Kantor Urusan Agama Padang Utara terbukti menolak untuk menikahkan **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** dengan **MALINI binti BURHANIS** karena anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, suami Pemohon, dan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **M. SAWIR bin MAK DINA** dan telah mempunyai anak 5 (lima) orang dan salah satunya bernama **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** yang lahir tanggal 02 November 1993;
- Bahwa anak Pemohon (**TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR**) sudah saling mencintai dengan **MALINI binti BURHANIS**, sudah siap secara fisik maupun mental untuk menikah karena **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp50.000,- perhari dan **MALINI binti BURHANIS** sudah siap untuk menjadi isteri **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** walaupun usianya lebih muda;
- Bahwa untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersedang Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang telah menjalin hubungan saling cinta mencintai dengan calon isterinyayang susah dipisahkan dan dengan prinsip mengutamakan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon **TAWFIQ HIDAYAT bin M.SAWIR** untuk menikah dengan calon isterinya **MALINI binti BURHANIS**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh Dra. **HELMAWATI KHAS** Ketua Majelis dan dihadiri oleh Drs. M. **JASMAN** dan Dra. Hj. **NOVIARNI, SH., M.A** Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2012 PA. Pdg tanggal 18 Januari 2012. Dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **MALIAS, S.Ag** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Dra. HELMAWATI KHAS

Hakim-Hakim Anggota

Drs. M. JASMAN

Dra. HJ. NOVIARNI, SH, M.A

Panitera Pengganti,

MALIAS, S.Ag



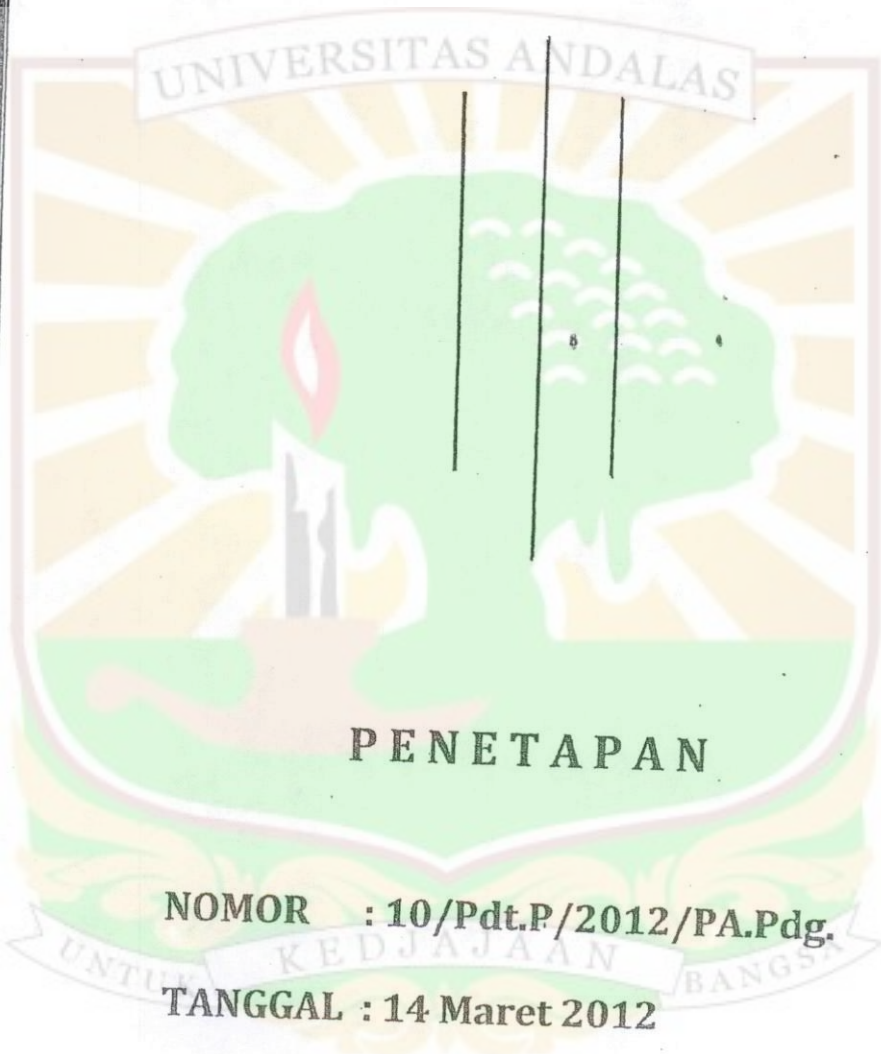
Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 151.000,-



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
JALAN DURIAN TARUNG NO. 1 BY PASS PADANG TELP. 0751-775436

PADANG



NOMOR : 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg.

TANGGAL : 14 Maret 2012

SYAFRUDDIN bin SAHARUDDIN

(Pemohon)



PENETAPAN

NOMOR : 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

SYAFRUDDIN bin SAHARUDDIN, umur 52⁴ tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jalan Petenggangan B. 3RT 007 RW 003 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama:

DARVIYOSA MELINDA binti SYAFRUDDIN, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Jalan Petanggangan B 3 RT 007 RW 003 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi saksi Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2012 yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor : 10/Pdt P/ 2012/ PA Pdg tanggal 09 Januari 2012 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama DARVIYOSA MELINDA karena masih berumur 15 tahun dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon (DARNALISKAbinti H BASRI telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mai 1992 tercatat pada Kantor



urusan Agama Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 111/38/1992 tanggal 30 Juni 1992;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama:

- SYAFRENDI REO F lahir tanggal 16 Agustus 1992;
- DARVINDA MARZIKA lahir tanggal 22 Oktober 1995;
- DARVIOSA MELINDA lahir tanggal 13 Desember 1996;
- WAHYU ANNESA lahir tanggal 17 Oktober 1999;
- ADIF MUDDAFA lahir tanggal 02 Februari 2002;
- NIGA ZELVIRA lahir tanggal 30 Oktober 2003;
- ILHAM DZAKIA lahir tanggal 06 Maret 2006;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama DARVIYOSA MELINDA telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : MAY YOGI SAPUTRA bin SHAHARUDDIN

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal : Jl M Yunus No: 35 RT003 RW 001 Kelurahan Lubuak Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon (DARVIYOSA MELINDA) dengan MAI YOGI SAPUTRA akan dilanjutkan sampai kejangkang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan anak Pemohon (DARVIYOSA MELINDA) dengan MAY YOGI SAPUTRA, ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dengan alasan anak Pemohon selaku calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;



5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon (DARVIYOSA MELINDA) dengan MAI YOGI SAPUTRA;

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon diperiksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (SYAFRUDDIN bin SAHARUDDIN) untuk mengizinkan anak Pemohon (DARVIYOSA MELINDA binti SYAFRUDDIN) menikah dengan calon suaminya (MAI YOGI SAPUTRA bin SYAHARUDDIN);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama DARVIYOSA MELINDA binti SYAFRUDDIN telah hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perbaikan maupun tambahan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang pasal 7 Undang-Undang No: 1 tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) dan selanjutnya dalam pasal tersebut dalam ayat 2 menyebutkan: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan diperlukan alat bukti ;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di Persidangan pada hal sidang selanjutnya adalah pembuktian sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala yang telah dicatat dalam berita acara dianggap termuat dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan demikian maka perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk diizinkan menikahkan anak Pemohon yang bernama DARVIYOSA MELINDA binti SYAFRUDDIN berumur 15 tahun dengan calon suaminya MAI YOGI SAPUTRA bin SHAHARUDDIN yang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi penjelasan tentang dispensasi untuk diizinkan menikahkan anak pemohon yang masih dibawah ketentuan umur dibolehkan melaksanakan perkawinan baik kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir satu kali pada sidang pembacaan permohonan dan pada waktu sidang tersebut Pemohon belum siap dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi sehingga sidang ditunda untuk pembuktian, namun pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang ke persidangan, yang akhirnya Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, sedangkan kepada Pemohon telah diberikan waktu dan kesempatan bahkan kepada Pemohon telah dilakukan pemanggilan dengan sah, namun Pemohon tidak menggunakan waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak terbukti, dengan demikian Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawatan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijrah oleh **Drs. MUHAMMAD. DJ.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs.M. JASMAN** dan **Dra. Hj. NELIATI,SH** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.Pdg tanggal 12 Januari 2012 dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **NURMASYITAH, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALAMAN NEGARA
TGL 14/3/2012

27BEC AAF843471556
ENAM RIBU RUPIAH
6000

KETUA MAJELIS,


Drs. MUHAMMAD DJ.

HAKIM ANGGOTA I


Drs. M. JASMAN

HAKIM ANGGOTA II


Dra. Hj. NELIATI, SH



PENITERA PENGGANTI

NURMASYITAH. SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang ~ 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1376 /UN.16.4/PP-2012
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 6 November 2012

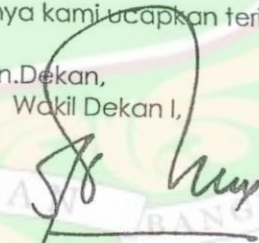
Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ria Amanda Yusra
Nomor BP	: 0910112155
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Adat dan Islam
Alamat	: Jl.Cupuk Tengah No.54 A, Pasar Baru Padang
Pembimbing I	: Prof.Dr. Yaswirman, MA
Pembimbing II	: Drs. Ali Amran, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan
Tempat Penelitian	: 3 bulan (7 November 2012 s/d 7 Februari 2013)
Dalam Rangka	: Pengadilan Agama Kelas IA Padang
Judul	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
	: Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I,


Yaserwan, SH., MH., LLM

Np. 1962 1231 1989 0110 021

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1376 /UN.16.4/PP-2012
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 6 November 2012

Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Kelas IA Padang

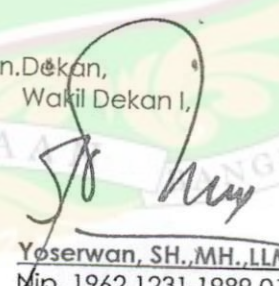
di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ria Amanda Yusra
Nomor BP	: 0910112155
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Adat dan Islam
Alamat	: Jl.Cupuk Tengah No.54 A, Pasar Baru Padang
Untuk Melaksanakan Waktu	: PENELITIAN LAPANGAN
Dalam Rangka	: 3 bulan (31 Oktober 2012 s/d 31 Januari 2013)
Judul	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi. : Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

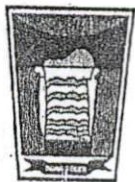
An.Dekan,
Wakil Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan ;

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.15.1849 /Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Surat dari : Wakil Dekan I Fak. Hukum Unand Padang

Nomor : 1376/UN.16.4/PP-2012

tanggal 6 November 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs, tanggal 8 November 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama ..

: RTA. AMANDA YUSRA

Tempat/Tanggal Lahir

: Bukittinggi, 3 Agustus 1991

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat

: Jl. Cupak Tengah No. 54.A Pasar Baru Padang

Maksud Penelitian

: Penyelesaian Skripsi

Judul Penelitian/Survey/PKL

: Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Lama Penelitian

: 3 (tiga) bulan

Lokasi/Tempat

: Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Penelitian/Survey/PKL

Anggota Rombongan

: -

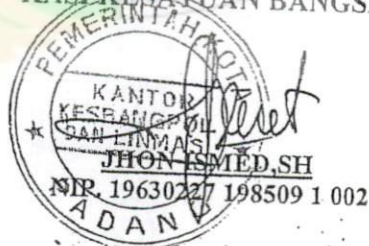
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 8 November 2012

An. Kepala

KASIKESATUAN BANGSA



Diteruskan : kepada Yth

1. Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Padang
2. Wakil Dekan I Fak. Hukum Unand Padang
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang
Telp. (0751) 775436; Facsimile : Telp. (0751) 775436; www.pa-padang.pta-padang.net.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-A1/178/TL.00/I/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

N a m a : RIA AMANDA YUSRA
Nomor NIM : 0910112155
Pekerjaan : Mahasiswi
Pogram Studi : Perdata Adat dan Islam

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 1376/UN.16.4/PP-2012 tanggal 06 November 2012, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sejak tanggal 07 November 2012 s/d 10 Januari 2013, dengan judul Skripsi "DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PADANG".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Padang, 11 Januari 2013



Dr. H. ERMIATI. N

NIP. 194808241967122003